

## POLA GERAKAN DAN ARAH PENDIDIKAN<sup>1</sup> KHILAFATUL MUSLIMIN DI BIMA

---

Syukri Abubakar, Irwan Supriadin J.

Email, [Syukri\\_ab@yahoo.com](mailto:Syukri_ab@yahoo.com)

Email, [Irwansupriadin@gmail.com](mailto:Irwansupriadin@gmail.com)

### Abstrak

*Khilafatul Muslimin (KM) lahir dilatar belakangi oleh kegelisahan pendirinya memperhatikan kondisi umat Islam yang kian hari kian terbelakang dan tertindas oleh hegemoni Barat dari segi politik, ekonomi dan sosial budaya. Oleh karenanya satu-satunya cara untuk mengembalikan kondisi umat Islam seperti masa lalu adalah dengan menegakkan kembali khilafah yang sudah lama tumbang. Penegakan khilafah ini bersifat wajib karena sudah dimaktubkan dalam al-Qur'an dan As-Sunnah.*

*Salah satu daerah yang dijadikan bascame KM adalah Bima yang terletak di ujung timur pulau Sumbawa. Mereka mendirikan sebuah madrasah sebagai pusat gerakan yang berfungsi sebagai tempat transfer of knowledge pada generasi muda KM. Untuk masyarakat umum, para ustadz KM gencar melakukan dakwah melalui media internet, FB dan Blog, menyampaikan khutbah bergilir di beberapa masjid, mengadakan diskusi keilmuan, dll.*

*Ormas KM ini bila dikaitkan dengan teori gerakan sosial, dilihat dari latarbelakang berdirinya, termasuk dalam kategori teori deprivasi relatif (relative deprivation theory), karena para pendirinya merasa kecewa terhadap kondisi kaum muslimin yang semakin hari semakin terpuruk dan menjauh dari syari'at Islam. Jika dilihat dari tipologinya, KM termasuk dalam kategori gerakan sosial transnasional movement, tipe gerakan sosial yang bercita-cita untuk mengubah kondisi sosial tertentu yang tidak hanya ada dalam lingkungan mereka, akan tetapi perubahan di seluruh dunia. Tipe gerakan sosial ini sering disebut dengan gerakan sosial baru (GSB) atau New Sosial Movement (NSM). Sztompka mengkategorikan KM sebagai gerakan konservatif, gerakan sayap kanan, yaitu gerakan yang berupaya untuk memperbaiki institusi, hukum, cara hidup, dan keyakinan yang telah mapan di masa lalu tetapi mengalami erosi dan dibuang dalam perjalanan sejarah.*

**Kata Kunci:** *Gerakan Sosial, Khilafatul Muslimin, Khilafah Islamiyah*

---

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Sunan Giri Bima

## Pendahuluan

Tema dalam tulisan ini sengaja dibahas dikarenakan konsep keagamaan khilafatul muslimin, selanjutnya disingkat KM, yang berbeda dengan umumnya masyarakat Bima, gaya dan penampilannya yang eksentrik dan keterbukaannya dalam pergaulan sosial masyarakat. Pada sisi lain, di Bima, organisasi ini terus berkembang seiring dengan perkembangan dakwah yang digelutinya.

Sekilas pantauan penulis terkait perkembangan KM, sudah memiliki struktur organisasi hingga tingkat kecamatan dan kelurahan/desa yang tersebar di beberapa daerah dengan jumlah pengikut yang semakin bertambah dan loyal terhadap organisasi. Struktur organisasi KM memiliki sebutan sendiri yang dimulai dari *Khalifah* pemegang kekuasaan tertinggi yang menaungi seluruh umat Islam sedunia, *Daulah* menaungi jama'ah yang terdiri dari beberapa wilayah, *Wilayah* menaungi jama'ah yang terdiri dari beberapa Ummul Qura, *Ummul Qura* menaungi jama'ah yang terdiri dari beberapa Kemas'ulan, *Kemas'ulan* menaungi jama'ah yang terdiri dari ±15 kepala keluarga.

Oleh karenanya, penulis ingin mengetahui lebih mendalam terkait KM dari sudut faham keagamaan yang dianut, strategi dan model dakwah yang dikembangkan serta modal sosial yang dijadikan pegangan. Untuk mengungkap kegelisahan tersebut, penulis menggali data dengan menelusuri buku dan dokumen terkait, googling melalui internet dan melakukan dialog dengan beberapa tokoh Khilafatul Muslimin, peneliti dan pemerhati masalah sosial di Bima. Dan untuk menganalisis tema ini, penulis menggunakan teori gerakan sosial *sosial movement theory*.

## Mengenal Teori Gerakan Sosial

Nanang Martono merujuk (Sunarto, 2004) mendefinisikan gerakan sosial sebagai hasil perilaku kolektif, yaitu perilaku yang dilakukan secara bersama-sama oleh sejumlah orang yang tidak bersifat rutin dan perilaku mereka merupakan hasil tanggapan atau respon terhadap rangsangan tertentu.<sup>2</sup> Sementara Sztompka mengatakan bahwa definisi gerakan sosial paling tidak harus memenuhi

---

<sup>2</sup>Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 392.

empat kriteria; 1) adanya kolektivitas, 2) memiliki tujuan bersama, yaitu mewujudkan perubahan tertentu dalam masyarakat mereka yang ditetapkan partisipan menurut cara yang sama, 3) kolektifitasnya relatif tersebar namun lebih rendah derajatnya daripada organisasi formal, 4) tindakannya memiliki derajat spontanitas tinggi, namun tidak terlembaga dan bentuknya tidak konvensional. Jadi kalau didefinisikan menjadi tindakan kolektif yang diorganisir secara longgar, tanpa cara terlembaga untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat mereka.<sup>3</sup>

Sztompka juga mengetengahkan beberapa definisi yang disampaikan oleh beberapa pakar dalam berbagai literatur, misalnya Blumer mendefinisikan gerakan sosial sebagai upaya kolektif untuk membangun tatanan kehidupan yang baru. Lang & Lang, upaya kolektif untuk mengubah tatanan sosial. Smelser, upaya kolektif untuk mengubah norma dan nilai. Lauer, upaya kolektif untuk mengendalikan perubahan atau untuk mengubah arah perubahan.<sup>4</sup>

Menurut Martono, ada banyak teori yang menjelaskan terbentuknya sebuah gerakan sosial. Dalam ilmu sosiologi, faktor yang diperhatikan sebagai pemicu gerakan sosial adalah faktor masyarakat bukan individu. Paling tidak ada dua teori yang menjelaskan alasan munculnya gerakan sosial, 1) teori deprivasi relatif (*relative deprivation theory*). Teori ini dikembangkan oleh Stouffer. Menurut teori ini, seseorang merasa kecewa karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Hal ini dipicu oleh proses melemahnya kendali dan tradisi kesukuan yang biasanya disertai dengan meningkatnya kadar keinginan, 2) teori mobilisasi sumber daya (*resource mobilization theory*). Teori ini menekankan pada faktor teknis bukan penyebab munculnya gerakan sosial. Teori ini

---

<sup>3</sup>Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, cet. 7 (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 325.

<sup>4</sup>Ibid. Definisi lain dari gerakan sosial, misalnya dikemukakan oleh Anthony Giddens sebagai upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama atau gerakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (*action collective*) diluar ruang lingkup lembaga- lembaga yang mapan. Fadhillah Putra dkk, *Gerakan Sosial, Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial Di Indonesia* (Malang : PlaCID's dan Averroes Press, 2006), 1. Mansoer Fakih menyatakan Gerakan Sosial dapat diartikan sebagai kelompok yang terorganisir secara tidak ketat dalam rangka tujuan sosial terutama dalam usaha merubah struktur maupun nilai sosial. Mansoer Fakih, *Tiada Transformasi Tanpa Gerakan Sosial*, dalam Zaiyardam Zubir, *Radikalisme Kaum Terpinggir: Studi Tentang Ideologi, Isu , Strategi Dan Dampak Gerakan*, (Yogyakarta : Insist Press , 2002), xxvii.

menjelaskan mengenai pentingnya pendayagunaan sumber daya secara efektif dalam menunjang gerakan sosial karena gerakan sosial yang berhasil memerlukan organisasi dan taktik yang efektif. Teori ini berpandangan bahwa kepemimpinan, organisasi, dan taktik merupakan faktor utama yang menentukan sukses atau gagalnya suatu gerakan sosial. 3) teori proses politik. Teori ini erat kaitannya dengan teori mobilisasi sumber daya. Pendekatan teori proses politik menekankan pada peluang-peluang bagi gerakan yang diciptakan oleh proses politik dan sosial yang lebih besar.<sup>5</sup>

Setelah mengetahui pengertian dan alasan terbentuknya gerakan sosial, penulis juga hendak mengetengahkan bentuk atau klasifikasi gerakan sosial. Dalam hal ini, penulis mengutip pandangan David Aberle yang berpendapat bahwa terdapat empat tipologi gerakan sosial, diantaranya; 1) *alternative movement*, yaitu gerakan sosial yang bertujuan untuk mengubah sebagian perilaku perseorangan. Misalnya, kampanye anti rokok, anti narkoba, tidak minum minuman keras dan tidak menggunakan zat adaptif yang berbahaya. 2) *redemptive movement*, yaitu gerakan sosial yang lebih luas cakupannya daripada *alternative movement*. Kebanyakan terdapat dalam masalah agama. Contohnya, gerakan yang menganjurkan orang untuk bertobat atau mengikuti ajaran agama, 3) *reformative movement*, yaitu gerakan yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat umum, namun ruang lingkup yang akan diubah hanya aspek-aspek tertentu saja dalam masyarakat. Seperti, gerakan sosial kelompok homoseksual untuk memperoleh pengakuan terhadap gaya hidup mereka atau gerakan kaum perempuan untuk memperjuangkan persamaan hak dengan laki-laki. 4) *transformative movement*, gerakan sosial yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat secara menyeluruh, tunjuk contoh; gerakan kaum Khmer Merah di Kamboja yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat komunis di Kamboja.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Martono, *Sosiologi*, 397.

<sup>6</sup>Ibid., 404-405. Sztompka dalam membuat tipologi gerakan sosial, menawarkan tujuh kriteria. Kriteria nomor dua yaitu gerakan sosial yang berbeda dalam kualitas perubahan yang diinginkan. Dari kriteria ini memunculkan dua buah gerakan, yaitu *gerakan progresif*, biasanya diidentikkan dengan gerakan sayap kiri dan *gerakan konservatif*, biasanya diidentikkan dengan gerakan sayap kanan. *Gerakan progresif* yaitu gerakan yang ingin membentuk masyarakat kepada suatu pola yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Perubahan diarahkan ke masa depan dan menekankan kepada suatu yang baru. Sebagai contoh, gerakan republik, sosialis, dan gerakan wanita. *Gerakan konserfatif* yaitu gerakan yang berupaya untuk memperbaiki institusi, hukum,

Henslin mengembangkan tipologi yang dibuat oleh Aberle tersebut dengan menambahkan dua tipologi, yaitu; pertama, *transnasional movement*, tipe gerakan sosial yang bercita-cita untuk mengubah kondisi sosial tertentu yang tidak hanya ada dalam lingkungan mereka, akan tetapi perubahan di seluruh dunia. Tipe gerakan sosial ini sering disebut dengan gerakan sosial baru (GSB) atau NSM, kedua, *metaformative movement*, suatu gerakan sosial yang berupaya mengubah tatanan sosial itu sendiri –bukan untuk satu atau beberapa kelompok masyarakat, melainkan untuk masyarakat seluruh dunia. Tujuan gerakan sosial ini adalah untuk mengubah konsep dan praktis ras, etnis, kelas, gender, keluarga, agama, pemerintah, dan stratifikasi sosial.<sup>7</sup>

### **Latarbelakang Muncul Khilafatul Muslimin (KM)**

Sebagaimana organisasi keagamaan lainnya, KM merupakan organisasi yang muncul dan berkembang dilatarbelakangi oleh kemunduran umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan terutama politik dan ekonomi yang telah “dikuasai” oleh bangsa Barat. Kondisi ini diperburuk dengan semakin dalamnya kesenjangan dalam kehidupan sosial masyarakat yang berimplikasi semakin meningkatnya angka kriminalitas dan penyakit sosial di tengah masyarakat.

Semua krisis tersebut menunjukkan betapa keroposnya pertahanan umat Islam menghadapi gempuran budaya dan pemikiran yang dilancarkan oleh negara-negara Barat dan segenap agen-agensya dari kalangan penguasa yang zalim dan kejam. Umat Islam yang jumlahnya lebih dari 1,5 milyar tak ubahnya bagai lautan buih yang tak memiliki kekuatan apa-apa. Realitas demikian sungguh bertolak belakang 180 derajat dengan kondisi umat yang sedemikian jaya saat Daulah Khilafah Islamiyah<sup>8</sup> tegak selama lebih dari 1000 tahun. Jelaslah, tanpa

---

cara hidup, dan keyakinan yang telah mapan di masa lalu tetapi mengalami erosi dan dibuang dalam perjalanan sejarah. Perubahan yang mereka ajukan diarahkan ke belakang dan tekanan diletakkan pada tradisi. Tunjuk misal, gerakan ekologis dan gerakan keagamaan fundamentalis; gerakan mayoritas moral di AS yang menghimbau untuk kembali ke nilai keluarga; gerakan loyalis yang menganjurkan kembali ke aturan dinasti; gerakan yang menghidupkan kembali sentimen etnis di Eropa Timur dan Eropa Tengah menyusul kehancuran komunis. Sztompka, *Sosiologi*, 333.

<sup>7</sup>Martono, *Sosiologi*, 405.

<sup>8</sup>Khilafah menurut Ibnu Khaldun, sebagaimana yang diyakini oleh jama'ah KM, merupakan pengganti Nabi Muhammad Saw. dengan tugas yang sama, yakni mempertahankan agama dan menjalankan kepemimpinan di dunia. Lembaga tersebut pada akhirnya disebut dengan

Daulah Khilafah Islamiyah kaum muslimin akan hidup bergelimang dengan kehinaan dan keterpurukan. Mereka terpecah belah menjadi puluhan negara, kekayaannya dirampok dan diangkut ke luar negeri, kezhaliman negara-negara imperialis Barat tak mampu dilawan, hukum-hukum kufur merajalela dengan leluasa, dan anak cucu Adam semakin jauh dari sifat fitri kemanusiaannya. Sementara itu hukum-hukum Allah yang adil, agung, dan mulia teronggok secara nista hanya dalam kitab-kitab fiqh yang usang dan berdebu. Kalaupun dikaji, hukum-hukum yang mulia itu hanya sekedar menjadi pengetahuan dan konsumsi otak belaka, jauh dari penerapannya dalam kehidupan nyata.

Karena itu, ketiadaan khilafah ini harus diakhiri dengan jalan menegakkan kembali Khilafah Islamiyah yang akan menerapkan kembali syari'ah Islamiyah secara totalitas. Hal itu merupakan keniscayaan untuk mengakhiri berbagai problem dan keburukan yang diderita umat saat ini dan untuk mengembalikan kejayaan dan kemuliaan ke tangan umat Islam. Penegakan Khilafah Islamiyah juga menjadi tuntutan dari kondisi faktual dunia. Ideologi dan sistem sosialisme komunisme telah tumbang dan ditinggalkan oleh umat manusia karena telah terbukti rusak, bobrok, dan buruk bagi umat manusia. Sementara ideologi dan sistem kapitalisme yang mendominasi dunia saat ini, tengah limbung didera berbagai krisis yang susul menyusul dan tak kunjung terselesaikan, bahkan makin hari makin besar dan makin parah. Kapitalisme tidak lagi bisa memberikan solusi dan harapan bagi umat manusia. Satu-satunya harapan bagi penyelesaian problem dunia, tidak ada lagi selain penerapan Syari'ah Islamiyah dalam sistem Khilafah Islamiyah.<sup>9</sup>

Dalam doktrin KM bahwa umat Islam harus memiliki pemimpin yang

---

kekhilafahan. Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 234. Terma khilafah dalam kajian keilmuan Islam didefinisikan dalam berbagai definisi. Al-Mawardi mendefinisikan khilafah sebagai pengganti Nabi Muhammad dalam mengurus dan memelihara agama, politik, dan urusan dunia. Abu Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 5. 'Abd al-Qadir 'Awdah, seperti dikutip Moenawar Kholil, mendefinisikan khilafah sebagai kepemimpinan umum yang berkedudukan sebagai pengganti Nabi Muhammad dalam urusan agama dan dunia. Dengan demikian, khilafah adalah suatu institusi yang bertugas menjalankan perundang-undangan Islam serta melanjutkan kepemimpinan setelah Nabi Muhammad Saw. dalam urusan agama dan dunia (politik). Lihat, Moenawar Kholil, *Khalifah (Kepala Negara) Sepanjang Pimpinan al-Qur'an dan Sunnah* (Solo: Ramadhani, 1984), 26.

<sup>9</sup> Disarikan dari hasil wawancara dengan Ahmad MS. *Qismut Tarbiyah wa Ta'lim* Daulah KM Sumbawa, 16 Mei 2016.

bertugas untuk menjalankan sebuah agenda besar dalam menegakkan syari'at Islam di seluruh dunia sebagai prasyarat dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dalam tataran kehidupan ini, sumber utama yang menjadi rujukan dalam kehidupan adalah al-Qur'an. Setelah itu adalah al-Sunnah. Karena itu, jika seseorang telah mengakui filsafat hidup yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai perwujudan dari realitas, maka tidak ada satu pun justifikasi yang bisa dibenarkan sebagai alasan untuk tidak mentaati tuntutan Tuhan bahkan pada bidang-bidang yang menjadi pilihan bebasnya sendiri sekalipun.<sup>10</sup>

Bagi jama'ah KM, kekhalifahan Islam adalah rumah besar untuk mewadahi implementasi syari'at Islam, mutiara yang hilang, yang harus ditegakkan kembali. KM menghendaki terbentuknya Daulah Islamiyah yang memiliki tokoh pemimpin atau khalifah yang dapat dipercaya untuk memimpin kaum muslimin di seluruh dunia. Makna yang tersirat dari ide di atas adalah terwujudnya persatuan kaum Muslimin sedunia di bawah panji-panji kekhalifahan sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Khulafaurrasyidin. Keyakinan yang demikian dijustifikasi dengan asumsi teologis-normatif antara lain sebuah hadis:

*“Telah berkata kepada kami Sulaiman bin Dawud al-Thayalisiy di mana ia berkata, “Dawud bin Ibrahim al-Wasithiy telah menuturkan hadis kepadaku (Sulaiman bin Dawud al-Thayalisiy). Dan Dawud bin Ibrahim berkata, “Habib bin Salim telah meriwayatkan sebuah hadis dari Nu'man bin Basyir; dimana ia berkata, “Kami sedang duduk di dalam Masjid bersama Nabi Saw.–Basyir sendiri adalah seorang laki-laki yang suka mengumpulkan hadis Nabi Saw. Lalu, datanglah Abu Tsa'labah al-Khusyaniy seraya berkata, “Wahai Basyir bin Sa'ad, apakah kamu hafal hadis Nabi Saw. yang berbicara tentang para pemimpin? Hudzaifah menjawab, “Saya hafal khuthbah Nabi Saw.” Hudzaifah berkata, “Nabi Saw. bersabda, “Akan datang kepada kalian masa kenabian, dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Kemudian, Allah akan menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang masa Kekhilafahan 'ala Minhaaj al-Nubuwwah; dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu, Allah menghapusnya jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang kepada kalian, masa raja menggigit (raja yang dzalim), dan atas kehendak Allah masa itu akan datang. Lalu, Allah menghapusnya, jika Ia berkehendak menghapusnya. Setelah itu, akan datang masa raja diktator (pemaksa); dan atas kehendak Allah masa itu akan datang; lalu Allah akan menghapusnya jika berkehendak menghapusnya. Kemudian, datanglah masa Khilafah 'ala*

---

<sup>10</sup>Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, 66-68.

*Minhaj al-Nubuwwah (Khilafah yang berjalan di atas kenabian). Setelah itu, beliau diam” (H.R. Ahmad).<sup>11</sup>*

Berpijak dari hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Yaman tersebut, maka sebagian umat Islam, termasuk di dalamnya KM, memahami bahwa fase-fase pemerintahan yang disinyalir oleh Rasulullah Saw. bahwa setelah beliau wafat, umat Islam akan dipimpin oleh para khalifah yang senantiasa berjalan di atas kebenaran sesuai dengan konsep kenabian (Periode Khulafaurrasyidin). Pasca kekhalifahan ini umat Islam akan dipimpin oleh *Mulkan A'adhon*, kerajaan yang menggigit (Periode Umaiyyah dan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad) hingga masa *fathrah* (kekosongan) tanpa khalifah selama 3,5 tahun. Setelah itu, umat Islam dipimpin oleh *Mulkan Jabariyyan*, kerajaan yang memaksa (Periode Dinasti Abbasiyyah yang berpusat di Mesir setelah masa *fathrah* dan Turki Usmani). Khilafatul Muslimin juga memahami bahwa semua fase yang disebutkan tadi adalah fase kepemimpinan Islam, meskipun ada yang berwujud *Khilafah 'ala Minhaj an-Nubuwwah* atau berbentuk kerajaan. Dasar hukum yang berlaku dalam kepemimpinan mereka adalah Islam, hanya saja di sana-sini didapati beberapa bentuk penyimpangan atau kedzaliman yang bersumber dari para pemimpin atau raja-raja mereka.

Pasca tumbangnya beberapa fase pemerintahan di atas, maka akan muncul kembali pada akhir zaman sebuah periode kekhalifahan yang adil yang sejalan dengan konsep-konsep yang pernah diterapkan pada masa Rasulullah Saw. dan Khulafaurrasyidin yang senantiasa berpijak pada al-Qur'an dan as-Sunnah dalam menjalankan pemerintahan. Maka dalam konteks inilah, KM bergerak menjadi pelopor bagi munculnya *Khilafah 'ala Minhaj an-Nubuwwah* (kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian). Setiap pergantian dari fase-fase tersebut ditandai dengan masa kekosongan (*fathrah*), yaitu masa diangkatnya kepemimpinan Islam hingga umat Islam berhasil membentuk kembali kepemimpinan Islam dalam tubuh mereka.

---

<sup>11</sup>Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini menurut penelusuran atau takhrij hadis yang dilakukan oleh Nadirsyah Hosen, Rais Syuriah PCI NU Australia-New Zealand dinyatakan bermasalah khususnya pada perawi yang bernama Habib bin Salim. Lihat dalam <http://www.islamnusantara.com/nadirsyah-hosen-kritik-hadis-khilafah/>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2016.

Setelah mengalami kevakuman selama  $\pm$  76 tahun tanpa kepemimpinan Islam, akhirnya Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja,<sup>12</sup> dari Indonesia yang menyusun dan menyampaikan maklumat tentang berdirinya kekhilafahan Islam yang disebut dengan konsep “Maklumat Khilafatul Muslimin” pada tanggal 13 Rabiul Awwal 1418 H/18 Juli 1997.<sup>13</sup> Konsep maklumat yang disusun oleh Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja’ ini merupakan akumulasi dari berbagai mimpi dan hasil perenungan selama beliau menghuni Lembaga Pemasyarakatan Kali Sosok Surabaya Jawa Timur sebagai tahanan politik oleh karena keterlibatannya dalam gerakan Negara Islam Indonesia (NII).

KM merupakan sebuah gerakan yang lahir dari ide Pan Islamisme yang tidak dapat diwujudkan melalui gerakan Negara Islam Indonesia (NII) yang telah diproklamlirkan sebelumnya. Sehingga apabila ditelusuri dari sejarah lahirnya, maka dapat ditemukan benang merah antara KM dengan Negara Islam Indonesia (NII) yang pernah dideklarasikan oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat, yang kandas karena penolakan serta reaksi keras dari rakyat dan pemerintah Indonesia pada saat itu.<sup>14</sup>

Akibatnya tokoh-tokoh NII yang masih tersisa pada masa itu memilih “hijrah” ke berbagai daerah dan negara untuk melanjutkan perjuangan tersebut. Di

---

<sup>12</sup>Abdul Qadir Hasan Baraja lahir pada tanggal 10 Agustus 1944 di Taliwang, Sumbawa. Pendiri Darul Islam di Lampung pada tahun 1970, pendiri Pondok Pesantren Ngruki. Abdul Qadir Hasan Baraja telah mengalami 2 kali penahanan, pertama pada Januari 1979 berhubungan dengan Teror Warman, ditahan selama 3 tahun. Kemudian ditangkap dan ditahan kembali selama 13 tahun, berhubungan dengan kasus bom di Jawa Timur dan Borobudur pada awal tahun 1985. Abdul Qadir Hasan Baraja mendirikan Khilafatul Muslimin, sebuah organisasi yang bertujuan untuk melanjutkan kekhilafahan Islam pada tahun 1997. Ia ikut ambil bagian dalam mendirikan Majelis Mujahidin Indonesia pada bulan Agustus 2000, tetapi tidak aktif menjadi anggota MMI (Majelis Mujahidin Indonesia). Lihat <http://www.sindoweekly.com/indonesia/magz/no-48-tahun-iv/nii-model-khilafatul-muslimin>.

<sup>13</sup>Isi maklumat ditelusuri di <http://khilafatulmuslimin.com/maklumat-bahasa/>

<sup>14</sup>NII berasal dari Darul Islam (DI) yang didirikan oleh SM Kartosuwiryo pada tahun 1947. Tahun berikutnya, pasca Perjanjian Renville (Januari 1948). Ia dan pengikutnya (Hizbullah dan Sabilillah) tidak mau hijrah ke Yogyakarta, karena merasa perlu menjaga Jawa Barat terhadap Belanda karena secara faktual gerakan Kartosuwiryo memang telah mengakar di Jawa Barat. Setidaknya ada dua alasan utama mengapa NII diproklamlirkan oleh Kartosuwiryo; *pertama*, karena TNI hijrah dari Jawa Barat ke Yogyakarta sebagai konsekuensi dari Perjanjian Renville, maka yang secara konsisten melawan Belanda tinggal pasukan Darul Islam. *Kedua*, pasca penyerangan oleh Belanda tanggal 2 Desember 1948, TNI menuntut agar semua tentara Darul Islam yang berada di Jawa Barat tunduk patuh kepada TNI. Kenyataan tersebut ditolak oleh Kartosuwiryo dengan alasan bahwa keberadaan TNI telah dihapus seiring dengan banyaknya anggota TNI yang tertangkap oleh Belanda di Yogyakarta. Lihat Deliar Noer, *Islam dan Politik*, (Jakarta: Yayasan Risalah, 2003), 8.

antara tokoh NII yang memilih hijrah adalah Ustadz Abubakar Ba'asyir dan Ustadz Abdullah Sungkar yang menjadikan Malaysia sebagai negara tujuan.

Selanjutnya, ide untuk menerapkan syari'at Islam kemudian berubah dari konteks lokal menuju konteks global. Gerakan yang pada mulanya hanya terbatas pada konteks keindonesiaan, kemudian diperluas menjadi konteks dunia dengan asumsi bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal bagi segenap manusia, maka kekhalifahan tidak terbatas pada kaum muslimin yang ada di Indonesia saja. Dalam perkembangannya, meskipun tokoh-tokoh NII banyak yang membidani lahirnya KM, namun pendekatan yang digunakan dalam menerapkan syari'at Islam kini berbeda, yakni tidak menggunakan pendekatan kekerasan maupun militeristik sebagaimana yang pernah terjadi pada masa lampau. Gerakan ini lebih banyak menekankan pada pendekatan membangun kesadaran dan penajaman pemahaman umat mengenai pentingnya khilafah dalam kehidupan setiap seorang Muslim. Sebab tidak sempurna keIslaman seseorang sampai dia bergabung pada kekhalifahan dan mempunyai pemimpin dalam perspektif Islam dengan sistem Islam, menurut mereka, tentunya.

Sebelumnya posisi khalifah/amirul mukminin ini telah ditawarkan kepada beberapa orang ulama yang mujahid, baik dalam maupun luar negeri, agar bersedia dipilih sehingga umat memiliki seorang imam/khalifah untuk ditaati dalam kehidupan. Namun sepanjang masa penawaran tersebut, tidak ada seorangpun tokoh yang bersedia untuk dipilih sehingga para sahabat Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja' mengembalikan maklumat tersebut kepada pencetus awalnya, yakni beliau sendiri dengan sebuah catatan penting bahwa, "*yang paling paham dengan maklumat tersebut tentu saja adalah pencetusnya sendiri dan dialah yang paling bertanggungjawab dengan posisi khalifah untuk menjadi bagian dari maklumat.*"

Kini, KM telah menjelma sebagai sebuah gerakan dakwah dan pendidikan yang menekankan pada pentingnya kembali pada nilai-nilai historis Islam yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah. Dan dalam perkembangannya, kini KM telah merambah dan menyebar di berbagai daerah dan Kota di Indonesia termasuk di antaranya di Bima dan telah menjelma sebagai organisasi yang telah memiliki banyak pengikut yang tersebar di berbagai kecamatan dan desa.

Berdirinya KM merupakan sebuah ikhtiar dari para pendirinya terutama ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja untuk menerapkan keyakinan tersebut dalam bentuk formal sebuah pemerintahan Islam. Namun pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintah yang diangkat dan dipilih melalui musyawarah kaum muslimin dengan mengedepankan semangat kebersamaan. Namun demikian perlu dipahami bahwa meskipun KM dalam penyelenggaraan kehidupannya memiliki konsep kenegaraan, bukan berarti membentuk lembaga pemerintahan seperti konsep negara modern yang kita kenal. Pelembagaan tersebut adalah bersifat pelembagaan jama'ah dalam satu kesatuan yang terstruktur secara sistematis sehingga memudahkan dalam pembinaan dan koordinasi guna mencapai kemaslahatan umat.<sup>15</sup> Pembentukan khilafah tidak dimaksudkan untuk membentuk negara dalam Negara. Artinya, eksistensi khilafah tidak akan mengganggu keutuhan dan kedaulatan NKRI. Ini sejalan dengan realitas bahwa dalam tubuh KM tidak terdapat sebuah mekanisme kerja pemerintahan yang bersifat kompleks dan rumit seperti halnya konsep dan sistem dalam sebuah ketatanegaraan dan pemerintahan modern seperti yang kita kenal sekarang ini.

Eksistensi KM sejalan dengan pandangan Muhammad Abid al-Jabiri yang merangkum dalam tiga unsur pokok, yakni: *pertama*, memilih calon pemimpin yang akan disertai tanggungjawab untuk mengurus hajat hidup kaum muslimin. *Kedua*, khalifah yang diangkat adalah seseorang yang berkuasa atas semua wilayah kaum muslimin. *Ketiga*, diangkat berdasarkan pilihan kaum muslimin.<sup>16</sup> Maka Khilafah dibentuk sebagai wadah bersatunya kaum muslimin yang bersifat universal dan tidak dibatasi oleh wilayah teritorial, sedangkan negara adalah sistem pemerintahan yang tidak bersifat universal dan dibatasi oleh daerah teritorial.

Secara organisatoris, mekanisme kerja dalam struktur birokrasi Khilafatul Muslimin hampir mirip dengan sistem kerja negara yang sesungguhnya, masing-masing mengemban tugas dan kewajiban untuk mengurus segenap urusan kaum

---

<sup>15</sup>Ahmad MS. Qismut Tarbiyah wa Ta'lim Daulah KM Sumbawa, Wawancara 16 Mei 2016.

<sup>16</sup>Muhammad Abid al-Jabiri, *Agama, Negara, dan Penerapan Syari'ah*, terj. Mujiburrahman, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), 66-67.

muslimin yang berada pada wilayah masing-masing. Struktur pemerintahan tersebut sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini:

Tingkatan Struktural	Jumlah
Kekhilafahan	Menaungi Umat Islam di seluruh dunia
Daulah	Menaungi jama'ah yang terdiri dari beberapa wilayah
Wilayah	Menaungi jama'ah yang terdiri dari beberapa Ummul Qura
Ummul Qura	Menaungi jama'ah yang terdiri dari beberapa kemas'ulan
Kemas'ulan	Menaungi jama'ah yang terdiri dari ±15 kepala keluarga

### Sketsa Khilafatul Muslimin Di Bima

Sejak dimaklumkan pada tahun 1997, kini KM telah berkembang cukup pesat di berbagai daerah di Indonesia, dalam perjalanan dakwahnya jama'ah KM bersifat inklusif dan membuka diri untuk bergaul dengan siapapun dan dari kalangan masyarakat manapun tanpa terbatas oleh sekat organisasi dan paham keagamaan.

Sesuai dengan misinya dalam menerapkan syari'ah Islam dan menegakkan khilafah, jama'ah KM sangat *concern* dengan kegiatan dakwah dan pendidikan, oleh karena pendidikan dan dakwah merupakan kunci utama dalam gerakan tersebut. Dalam bidang pendidikan, jama'ah KM telah berikhtiar dalam mendirikan dan mengelola madrasah sebagai salah satu upaya dalam menanamkan kesadaran berkhilafah kepada umat Islam. Perkembangan terakhir, Jama'ah KM telah mendirikan lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan KM yang berpusat di Bekasi. Sejauh ini, Yayasan tersebut telah memiliki 4 madrasah dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi yang tersebar di 4 daerah di Indonesia, yakni Kota Bekasi, Kota Lampung, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Bima.

Kurikulum yang digunakan oleh madrasah tersebut diatur sesuai dengan kebutuhan umat dan tidak menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah guna mendapatkan ijazah persamaan bagi santri yang membutuhkan. Dalam bidang pendidikan, jama'ah KM hingga kini mampu memberikan subsidi penuh kepada semua institusi pendidikan yang bernaung di dalamnya. Dengan

pola ini, maka seluruh biaya operasional madrasah yang mencakup gaji guru, karyawan, serta beasiswa penuh bagi santri, menjadi tanggungjawab kekhalifahan melalui *Wizaaratut Tarbiyah wa Ta'lim*, yaitu departemen yang menangani bidang pendidikan. Sistem pendidikan yang diterapkan mirip dengan model pesantren dengan mengasramakan seluruh santri sehingga santri mendapatkan bimbingan dan pengawasan penuh dari para asatidz selama menjalani proses pendidikan.

Madrasah yang diberi nama *Ukhuwah Islamiyah* tersebut merupakan pusat pendidikan yang tidak hanya berfungsi sebagai wadah bagi proses *transfer of knowledge* semata oleh karena di sisi lain madrasah tersebut dijadikan sebagai miniatur bagi proses internalisasi dan penerapan konsep kekhalifahan. Sehingga materi pelajaran pada madrasah tersebut mengkombinasikan materi pendidikan agama dan konsep sistem kekhalifahan. Selain memberikan ilmu pengetahuan dasar pengetahuan agama dan pengetahuan umum, Madrasah Ukhuwah Islamiyyah telah menerapkan pendidikan ekstrakurikuler yang memberikan bekal khusus *life skill* kepada para santri seperti keterampilan dasar ekonomi, pertanian, perikanan, dan lain sebagainya.

Selain mengembangkan diri melalui program pendidikan, jama'ah KM mengembangkan diri melalui jalur sosial dan dakwah. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya media dakwah yang telah dimanfaatkan secara optimal di antaranya penerbitan buku dan majalah al-Khilafah yang terbit secara berkala dan dibaca oleh segenap jama'ah KM. Seiring dengan kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi, KM telah memanfaatkan laman *website* serta jejaring sosial sebagai media dakwah dan sosialisasi program-program sosial dan dakwah yang dilakukannya. Perkembangan terakhir menunjukkan telah banyak kader-kader KM yang menggunakan laman *blog* sebagai media komunikasi dan informasi untuk menyampaikan pesan-pesan kekhalifahan kepada publik.

### **Respons Masyarakat Bima**

Kehadiran KM di Indonesia dan lebih khusus di Kota dan Kabupaten Bima telah membawa nuansa baru dalam kehidupan keberagamaan, utamanya dalam tatanan pergaulan sosial. Sebagaimana yang telah di paparkan sebelumnya, KM merupakan organisasi keagamaan yang cenderung kental dengan nuansa

Islam simbolik dalam setiap aktivitas dan gerakan sosial keagamaannya, yang secara langsung maupun tidak langsung, telah menciptakan *gap* psikis antara warga pengikut dengan warga masyarakat umum lainnya. Hal ini pada akhirnya memunculkan beragam pandangan dari berbagai kalangan masyarakat sekitarnya.

Setidaknya ada tiga model sikap masyarakat Bima dalam menilai keberadaan jama'ah KM:<sup>17</sup>

*Pertama*, memberikan penilaian yang cenderung skeptis melihat kehadiran organisasi tersebut karena dianggap terlalu bernostalgia dengan kejayaan umat Islam pada masa lampau. Kelompok ini menilai bahwa apa yang ditampilkan oleh jama'ah KM terlalu kaku dan tidak adaptatif terhadap kondisi sosial dan kultur masyarakat setempat yang tentu saja tidak bertentangan dengan ajaran agama. Selain itu karena paham keagamaan atau fiqh yang dianut oleh warga KM berbeda dengan faham *mainstream* yang dianut dan berlaku di tengah masyarakat Bima. Contohnya perayaan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, ritual tujuh bulanan (*Kiri Loko*), tahlilan, doa 40 hari bagi si mayit, dan lain sebagainya. Beberapa aspek yang telah disebutkan tadi merupakan titik perbedaan ajaran KM dengan masyarakat setempat sehingga penerimaan terhadap kehadiran KM seringkali menimbulkan resistensi di tengah masyarakat.

*Kedua*, menerima dengan tangan terbuka. Setelah mempelajari dan menerima penjelasan terkait dengan visi dan pemahaman organisasi ini untuk menegakkan kembali khilafah Islamiyah serta mengembangkan suasana kehidupan Islami dengan menerapkan syari'at Islam secara totalitas dalam semua aspek dan aktivitas kehidupan masyarakat. Kelompok kedua ini menganggap bahwa KM merupakan sebuah jama'ah yang banyak mengajarkan tentang perihal ibadah dan konsisten untuk berusaha mencapai keridhaan Allah Swt., baik melalui ibadah yang wajib maupun yang sunnah seperti memperbanyak *shalawat*, *zikir*, *wirid*, dan *qiyamul lail*. Perilaku santun yang menjadi ciri dari dakwah jama'ah KM juga dianggap sebagai salah satu daya tarik yang memikat sebagian kalangan untuk masuk dan bergabung dalam organisasi tersebut. Selain beberapa faktor tersebut, keterbukaan dan penerimaan masyarakat kepada jama'ah KM

---

<sup>17</sup>Irwan Supriadin J, & Syukri, *Catatan Ringan Seputar Khilafatul Muslimin di Bima*, (Mataram: Alamtara Institut, 2013), 93-96.

dikarenakan jama'ah ini cenderung toleran dan tidak membelakangi kaum muslimin yang tidak sejalan dari segi pemikiran dan pemahaman agama.

*Ketiga*, setuju dan ikut bergabung menjadi bagian dari jama'ah serta konsisten dalam melaksanakan ajaran-ajaran serta mengimplementasikan konsep-konsep kekhalifahan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

### **Khilafatul Muslimin sebagai Gerakan Sosial**

Sebagaimana dijelaskan dimuka bahwa KM merupakan organisasi keagamaan yang memiliki visi dan misi menegakkan syari'at Islam di muka bumi ini. Mereka berkeyakinan bahwa penegakan khilafah sama wajibnya dengan penegakan sholat lima waktu. Oleh sebab itu, tidak ada kata putus asa untuk menegakkan khilafah. Mereka tetap optimis bahwa penegakan khilafah ini pada saatnya nanti akan terlaksana karena sudah ditetapkan dalam al-Qur'an dan al-Hadist sebagaimana yang dijelaskan dimuka.

Menilik dari paparan di atas, jika dikaitkan dengan teori sosial yang dikemukakan oleh para ahli, maka kalau dilihat dari latarbelakang timbulnya gerakan KM ini termasuk dalam kategori teori deprivasi relatif (*relative deprivation theory*). Teori ini dikembangkan oleh Stouffer. Menurut teori ini, seseorang merasa kecewa karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Hal ini dipicu oleh proses melemahnya kendali dan tradisi kesukuan yang biasanya disertai dengan meningkatnya kadar keinginan. Dalam hal ini, jama'ah KM merasa kecewa dan frustrasi melihat kondisi umat Islam saat ini yang sudah jauh menyimpang dari syari'at Islam. Agar ajaran Islam dapat diimplementasikan secara kaffah dalam kehidupan sehari-hari, maka diperlukan sarana untuk mewadahnya. Hal itu tidak lain adalah khilafah. Khilafahlah satu-satunya jalan untuk tegaknya syari'at Islam di muka bumi ini. Untuk menegakkan khilafah, maka umat Islam yang dipelopori oleh Abd. Qadir Hasan Baraja mendirikan organisasi kemasyarakatan yang dinamai dengan KM.

Jika dilihat dari tipologinya, maka KM termasuk dalam kategori gerakan sosial *transnasional movement*, tipe gerakan sosial yang bercita-cita untuk mengubah kondisi sosial tertentu yang tidak hanya ada dalam lingkungan mereka, akan tetapi perubahan di seluruh dunia. Tipe gerakan sosial ini sering disebut dengan gerakan sosial baru (GSB) atau New Sosial Movement (NSM).

Sementara kalau mengikuti tipologi gerakan sosial yang dijelaskan oleh Sztompka dari tujuh kriteria, kriteria nomor dua yaitu gerakan sosial yang berbeda dalam kualitas perubahan yang diinginkan. Dari kriteria ini memunculkan dua buah gerakan, yaitu *gerakan progresif*, biasanya diidentikkan dengan gerakan sayap kiri dan *gerakan konservatif*, biasanya diidentikkan dengan gerakan sayap kanan. Maka KM bisa dikategorikan sebagai gerakan konserfatif yaitu gerakan yang berupaya untuk memperbaiki institusi, hukum, cara hidup, dan keyakinan yang telah mapan di masa lalu tetapi mengalami erosi dan dibuang dalam perjalanan sejarah. Perubahan yang mereka ajukan diarahkan ke belakang dan tekanan diletakkan pada tradisi. Dalam hal ini KM berkehendak meneruskan kekhalifahan yang pernah jaya pada masa lampu, kemudian mengalami kekosongan selama puluhan tahun, lalu ditegakkannya kembali sampai saat ini dengan mendirikan jama'ah KM yang wilayahnya tidak hanya berdasarkan wilayah bangsa dan negara tapi untuk seluruh umat Islam sedunia.

### Catatan Akhir

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa KM lahir dilatarbelakangi oleh kegelisahan pendirinya memperhatikan kondisi umat Islam yang kian hari kian terbelakang dan tertindas oleh hegemoni Barat dari segi politik, ekonomi dan sosial budaya. Oleh karenanya satu-satunya cara untuk mengembalikan kondisi umat Islam seperti masa lalu adalah dengan cara menegakkan kembali khilafah yang sudah lama tumbang. Penegakan khilafah ini bersifat wajib karena sudah dimaktubkan dalam al-Qur'an dan As-Sunnah.

Cita-cita inilah yang sedang diusahakan oleh anggota KM Bima dengan mendirikan madrasah sebagai tempat *transfer of knowledge* pada generasi muda KM. Untuk masyarakat umum, para ustadz KM gencar melakukan dakwah melalui media internet, FB dan Blog, menyampaikan khutbah bergilir di beberapa masjid, mengadakan diskusi keilmuan, dll.

Maka KM kalau dikaitkan dengan teori gerakan sosial, dilihat dari latarbelakang berdirinya, termasuk dalam kategori teori deprivasi relatif (*relative deprivation theory*), karena para pendirinya merasa kecewa terhadap kondisi

kaum muslimin yang semakin hari semakin terpuruk dan menjauh dari syari'at Islam.

Jika dilihat dari tipologinya, KM termasuk dalam kategori gerakan sosial *transnasional movement*, tipe gerakan sosial yang bercita-cita untuk mengubah kondisi sosial tertentu yang tidak hanya ada dalam lingkungan mereka, akan tetapi perubahan di seluruh dunia. Tipe gerakan sosial ini sering disebut dengan gerakan sosial baru (GSB) atau New Sosial Movement (NSM).

Sementara tipologi gerakan sosial yang dijelaskan oleh Sztompka. KM termasuk kategori *gerakan konservatif*, gerakan sayap kanan, yaitu gerakan yang berupaya untuk memperbaiki institusi, hukum, cara hidup, dan keyakinan yang telah mapan di masa lalu tetapi mengalami erosi dan dibuang dalam perjalanan sejarah. Wallahu a'lam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t..
- Deliar Noer, *Islam dan Politik*, Jakarta: Yayasan Risalah, 2003.
- Fadhillah Putra dkk, *Gerakan Sosial, Konsep, Strategi, Aktor, Hambatan dan Tantangan Gerakan Sosial Di Indonesia*, Malang : PlaCID's dan Averroes Press, 2006.
- <http://www.sindoweekly.com/indonesia/magz/no-48-tahun-iv/nii-model-khilafatul-muslimin>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2016.
- <http://khilafatulmuslimin.com/maklumat-bahasa/>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2016.
- Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Irwan Supriadin J, & Syukri, *Catatan Ringan Seputar Khilafatul Muslimin di Bima*, Mataram: Alamtara Institut, 2013.
- Mansoer Fakhri, Tiada Transformasi Tanpa Gerakan Sosial, dalam Zaiyardam Zubir, *Radikalisme Kaum Terpinggir: Studi Tentang Ideologi, Isu, Strategi Dan Dampak Gerakan*, (Yogyakarta : Insist Press, 2002), xxvii.
- Moenawar Kholil, *Khalifah (Kepala Negara) Sepanjang Pimpinan al-Qur'an dan Sunnah*, Solo: Ramadhani, 1984.
- Muhammad Abid al-Jabiri, *Agama Negara dan Penerapan Syari'ah*, diterj. Mujiburrahman, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001.
- Musthofa Jaelani, *Mengenal Khilafatul Muslimin*, Bandar Lampung: Pustaka al-Khilafah, 2012.
- Nadirsyah Hosen, Rais Syuriah PCI NU Australia-New Zealand dalam <http://www.islamnusantara.com/nadirsyah-hosen-kritik-hadis-khilafah/>. Diakses pada tanggal 7 Mei 2016.
- Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 392.
- Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, cet. 7, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Tim Redaksi, *Majalah al-Khilafah*, Bandar Lampung: Pustaka al-Khilafah, 2013.